

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN E-KATALOG LOKAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEIKUTsertaan PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**(STUDI KASUS SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU)**

Oleh:

Aldi Setiawan

NPM : 2052054

E-katalog lokal merupakan aplikasi buatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berfungsi untuk memajangkan produk penyedia khususnya produk UMKM. Namun, sedikitnya jumlah UMKM yang bergabung dalam e-katalog lokal menjadi masalah yang harus di benahi oleh Pemerintah Kabupaten OKU. Latar belakang masalah adalah bagaimana implementasi pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten OKU dalam rangka meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar begabung di e-katalog lokal. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2023 di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten OKU di Bagian Unit Pengadaan Barang dan Jasa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan e-katalog lokal di Kabupaten OKU berjalan belum baik walaupun adanya peningkatan dari pelaku UMKM yang bergabung dalam e-katalog lokal akan tetapi masih jauh dari kata optimal terlihat dari jumlah UMKM sebelumnya hanya 28 pelaku kemudian bertambah menjadi 126 pelaku UMKM dari 45.334 UMKM Kabupaten OKU. Ini dinilai dari empat indikator implementasi kebijakan menurut Edwards yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang dibangun hanya melalui sosialisasi tatap muka langsung saja sedangkan sosialisasi melalui media elektronik, media cetak ataupun melalui media internet belum dilakukan. Sumber daya yang dimiliki cukup tersedia dengan baik itu sumber daya manusia, fasilitas, namun untuk sumber daya finansial sendiri Kabupaten OKU mengalami defisit anggaran. Disposisi atau kecendrungan pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen untuk terus bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan struktur birokrasi yang belum mampu berkolaborasi dengan instansi yang lain antara unit PBJ, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas DPMPTSP, serta KPP Pratama Kabupaten OKU.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, E-katalog Lokal, dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF LOCAL E-CATALOG IMPLEMENTATION IN OGAN KOMERING ULU DISTRICT IN ORDER TO INCREASE PARTICIPATION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**

**(CASE STUDY REGIONAL SECRETARIAT OF GOODS AND SERVICES  
PROCUREMENT SECTION OF OGAN KOMERING ULU DISTRICT  
GOVERNMENT)**

*By Aldi Setiawan*

*NPM : 2052054*

*Local E-Catalog is an application created by the Government Goods and Services Procurement Policy Institute which functions to display provider products, especially MSME products. However, the small number of MSMEs joining the local e-catalog is a problem that must be addressed by the Ogan Komering Ulu Regency Government. The background to the problem is how to implement local e-catalogs in Ogan Komering Ulu Regency in order to increase the participation of micro, small and medium enterprises. The aim of this research is to increase the participation of micro, small and medium enterprises to join local e-catalogues. This research was conducted on October 6 2023 at the Regional Secretariat Office of Ogan Komering Ulu Regency in the Goods and Services Procurement Unit Section. This research uses qualitative research with a case study approach. The data sources used are primary data and secondary data.*

*This research resulted in a conclusion that the implementation of the local e-catalog in Ogan Komering Ulu Regency is going quite well and there is an increase in MSME actors joining the local e-catalog , although it is still far from optimal, as seen from the number of MSMEs previously only 28 actors then increasing to 126 MSME actors by 45.334 MSME actors. This is measured from four indicators of policy implementation according to Edwards, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Communication that was built through face to face socialization went well, but socialization via electronic media, print media or via the internet has not been carried out. The resources available are also available, including human resources, facilities and financial resources. The disposition or tendency of policy implementers to be committed to continuing to be responsible for implementing policies and a bureaucratic structures that have not been able to collaborate with other agencies include the PBJ unit, the cooperatives and MSMEs Service, the DPMPTSP Service, and the KPP Pratama of OKU Regency.*

*Keywords: Policy Implementation, Local E-catalog, and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*

